

## **SKRIPSI**

# **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Kasus Putusan Nomor:09/pid.sus/2014/PN.Jnp)**



**OLEH :  
SUWANDY  
B 111 11 902**

**BAGIAN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2015**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENCURIAN SEPEDA MOTOR YANG DILAKUKAN  
OLEH ANAK  
(Studi Kasus Putusan Nomor:09/pid.sus/2014/PN.Jnp)**

**OLEH :  
SUWANDY  
B 111 11 902**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi Sarjana  
dalam Program Studi Ilmu Hukum**

**Pada**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2015**

## **PENGESAHAN SKRIPSI**

### **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**

**(Studi Kasus Putusan Nomor:09/Pid.Sus/2014/PN.Jnp)**

**Disusun dan diajukan oleh**

**SUWANDY**

**B111 11 902**

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk  
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Hari Selasa 14 April 2015  
Dan Dinyatakan Diterima

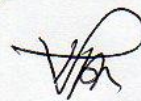
#### **Panitia Ujian**

**Ketua**



**Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.**  
NIP. 19631024 198903 1 002

**Sekretaris**



**Hj. Haerahan., S.H., M.H.**  
NIP. 19661212 199103 2 002

**An. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,**



**Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.**  
NIP. 1961 0607 198601 1 003



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari:

Nama : SUWANDY

No. Induk : B 111 11 902

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian  
Sepeda Motor Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus  
Putusan Nomor:09/pid.sus/2014/PN.Jnp)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam seminar ujian skripsi  
pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, Januari 2015

PEMBIMBING I



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.  
NIP. 196310241989031002

PEMBIMBING II



Hj. Haeranah, S.H., M.H.  
NIP. 196612121991032002

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

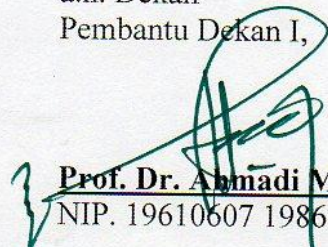
Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **SUWANDY**  
No. Pokok : B111 11 902  
B a g i a n : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pencurian  
Sepeda Motor Yang Dilakukan oleh Anak  
(Studi Kasus Putusan Nomor :09/Pid.Sus/2014/PN.Jnp)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Maret 2015

a.n. Dekan  
Pembantu Dekan I,

  
**Prof. Dr. Amadi Miru, S.H.,M.H.**  
NIP. 19610607 198601 1 003

## ABSTRAK

**Suwandy**, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor:09/pid.sus/2014/PN.Jnp), Yang dibimbing oleh **Syamsuddin Muchtar** sebagai Pembimbing I dan **Haeranah** Sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum terhadap tindak pidana pencurian Sepeda Motor yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Jeneponto Nomor: 09/PID.SUS/2014/PN.Jnp dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian Sepeda Motor yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Jeneponto Nomor:09/PID.SUS/2014/PN.Jnp.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jeneponto dengan melakukan wawancara langsung dengan Hakim yang memutuskan perkara pencurian yang dilakukan oleh Anak. Di samping itu, peneliti juga melakukan studi kepustakaan dengan cara menelaah buku-buku, literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: **Pertama**, Berdasarkan pemeriksaan di persidangan, Hakim menerapkan Pasal 363 ayat (2) KUHPidana terhadap Terdakwa. Dalam pemeriksaan yang berlangsung, Hakim menemukan bahwa Terdakwa benar melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan menganggap Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya . **Kedua**, Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian Sepeda Motor yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Jeneponto Nomor:09/PID.SUS/ 2014/PN.Jnp. Hakim dalam menjatuhkan putusan selain mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana, juga memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta hal-hal yang memberatkan dan juga hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa. Selain itu sanksi pidana dijatuhkan tidak bertujuan merusak masa depan Terdakwa namun hanya memberikan efek jera sehingga Terdakwa bisa menjadi lebih baik.

## ABSTRACT

**Suwandy**, Judicial Review of Criminal Acts Against Theft of Motorcycles conducted by The Child (Case Study of Decision No. 09 / pid.sus / 2014 / PN.Jnp), which is guided by **Syamsuddin Muchtar** as Supervisor I and **Haeranah** as Supervisor II.

This study aims to determine the application of the law to the crime of theft Motorcycle done by children in Jeneponto Number: 09 / PID.SUS / 2014 / PN.Jnp and consideration of judges in imposing criminal of law against children as perpetrators of the crime of motorcycle's theft that performed by children in Jeneponto Number: 09 / PID.SUS / 2014 / PN.Jnp.

The research was conducted in the District Court of Jeneponto with direct interviews with the judge who decided the case of theft committed by children. In addition, researcher also conducted a study of literature by means of reviewing the books, literatures and legislation related to matters that are discussed in this thesis.

The results showed that: **Firstly**, based on the examination in the trial, judge applied the 363th article paragraph (2) of the Criminal Code against the defendant. In the ongoing investigation, the judge found that the defendant actually doing the crime of theft by weighting and considering the defendant can be held accountable for his actions. **Second**, consideration of judges in imposing criminal law against children as perpetrators of the crime of theft of Motorcycle done by children in Jeneponto Number: 09 / PID.SUS / 2014 / PN.Jnp. The judge in decisions while considering the elements of a criminal offense, also pay attention to the facts revealed in the trial as well as things that are burdensome and also the things that relieved the defendant. In addition to criminal sanctions imposed are not aimed in undermining the future of the defendant but only provide the deterrent effect so that the defendant could make amends.

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Assalamu Alaikum Wr.Wb.*

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat ALLAH SWT, Tuhan Sesembahan semesta Alam. Itulah kalimat pertama yang paling pantas diucapkan mengawali rasa syukur penulis. Atas Rahmat dan IzinNya semua berjalan dengan lancar sesuai harapan. Kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, Manusia Sempurna Sang pembawa kabar gembira dan pencerah Jalan kebenaran semoga salam dan shalawat senantiasa kita curahkan kepada Beliau, keluarga dan para sahabatnya.

Sungguh proses penyelesaian skripsi ini tidaklah mudah, butuh keuletan, menejemen waktu yang baik sehingga dapat selesai tepat waktu. Oleh karena itu, skripsi ini kupersembahkan untuk orang-orang tercinta yang senantiasa mendukung dan mendoakan penulis yaitu kepada Ayah dan Ibu tercinta Bapak Halim Dg Tamma dan Ibu Somba Dg Baji, dan Nenek Tercinta Sugialang Dg Nurung semoga Allah senantiasa memberi umur panjang, amin. Kepada Kakanda yang saya hormati Suardi Dg Lallo dan Kakak Ipar Hartati Dg Nia serta Ponakan-ponakanku Sunaldi Dg Tinggi dan Suheti Dg Intang terima kasih atas dukungan yang tak terhingga.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidaklah sempurna, karenanya dibutuhkan kritik dan saran yang sifatnya membangun agar dapat menjadi pelajaran tambahan bagi penulis dalam menambah wawasan penulis.



Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung dan memberikan bantuan selama penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A.
2. Ibu dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Farida Patittingi. SH.,M.Hum yang telah berjasa kepada fakultas hukum Unhas ini.
3. Bapak Prof. Dr. Muhadar SH, MS. Selaku ketua Bagian Hukum pidana.
4. Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H., selaku pembimbing pertama saya yang selalu memberikan petunjuk- dan memotivasi saya dalam penyelesaian karya ini.
5. Ibu Hj. Haeranah SH.,MH., selaku pembimbing kedua saya, terima kasih atas kesabaran ibu dalam memberikan saran-saran yang membuat penulis jadi bersemangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang membagikan ilmu-ilmu hukum yang dimiliki.
7. Kepada Bagian Akademik yang telah melayani kami mahasiswa selama hampir empat tahun menjadi mahasiswa fakultas hukum Universitas Hasanuddin.
8. Kepada kakanda Musakkir,S.H.,M.H yang telah banyak membantu dari awal perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini.

9. Kepada Adinda terkasih Anita Afrianti, sosok kekasih yang selalu setia mendampingi, memberi dukungan semangat dan motivasi yang tiada henti pada penulis. Terima kasih atas segala bantuan atas kesabarannya selama ini.
10. Kepada kawan-kawan seperjuangan *Mediasi* Angkatan 2011, sampai jumpa dipuncak kesuksesan.
11. Rekan-rekan KKN Reguler Kabupaten bone, terkhusus untuk rekan-rekan Posko di desa Ulo, Ripai Risahondua, Syarif Hidayat, Richard Matias Sumolang, Irnawati Nur, Niluh Widya Utami dan Purnama M. Kaimun semoga silaturahmi kita tetap terjaga. Dan juga kepada Ibu/bapak Desa terima kasih atas dedikasinya selama kami menempati rumah ibu.
12. Kepada kawan-kawan UKM Pencak Silat Universitas Hasanuddin.
13. Kepada kawan-kawan Diklat Pencak Silat dan seluruh Pelatih PPLP Dispora Sulawesi Selatan.
14. Kepada kawan-kawan Kelas XII IPS.2 Angkatan 2009 dan Bapak/Ibu guru serta jajaran staf SMA Negeri 22 Makassar.
15. Kepada seluruh warga Pondok Baitul Hikmah, senang bisa berbagi dalam suka dan duka.

Makassar, Januari 2015

**Suwandy**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	 <b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan .....	7
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	 <b>9</b>
A. Pengertian Tinjauan Yuridis.....	9
B. Tinjauan Umum Terhadap Hukum Pidana .....	9
1. Pengertian Hukum Pidana .....	9
2. Tujuan Pidana .....	12
3. Jenis-jenis Pidana .....	17
C. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana.....	18
1. Pengertian Tindak Pidana.....	18
2. Unsur-unsur Tindak Pidana .....	21
3. Jenis-jenis Tindak Pidana .....	22
4. Tempat dan Waktu Tindak Pidana.....	24
D. Tindak Pidana Pencurian.....	25
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian .....	25
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian .....	26
3. Jenis-jenis Tindak Pidana Pencurian.....	38
E. Sanksi Pidana dan Tindakan Bagi Anak .....	45
1. Pidana Pokok .....	46
2. Pidana Tambahan .....	48
3. Tindakan.....	49

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>51</b>
A. Lokasi Penelitian.....	51
B. Jenis dan Sumber Data .....	51
C. Teknik Pengumpulan Data .....	52
D. Analisis Data .....	52
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>53</b>
A. Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor yang Dilakukan Oleh Anak di Kabupaten Jeneponto Nomor.09/PID.SUS/2014/PN.Jnp.....	53
1. Posisi Kasus .....	53
2. Dakwaan Penuntut Umum.....	57
3. Tuntutan Penuntut Umum.....	62
4. Analisis Penulis.....	64
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor yang Dilakukan Oleh Anak di Kabupaten Jeneponto Nomor.09/PID.SUS/2014/PN.Jnp.....	64
1. Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS).....	64
2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana.....	67
3. Amar Putusan .....	71
4. Analisis Putusan .....	72
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum bukan berdasarkan atas kekuasaan, hal ini secara tegas disebutkan dalam penjelasan umum Undang-Undang 1945.

Negara hukum menghendaki agar hukum ditegakkan tanpa memandang tingkatan sosial, artinya segala perbuatan baik oleh warga masyarakat maupun penguasa Negara harus di dasarkan kepada hukum. Setiap warga Negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan wajib menjunjung hukum tersebut.

Bangsa Indonesia selain mengalami perkembangan pesat dalam bidang hukum juga mengalami di bidang pendidikan. Kebudayaan dan teknologi tetapi disadari atau tidak oleh masyarakat bahwa tidak selamanya perkembangan itu membawa dampak yang positif melainkan juga membawa dampak negatif. Dampak negatif terlihat dengan semakin meningkatnya kejahatan yang terjadi di masyarakat khususnya kejahatan terhadap pencurian kendaraan bermotor.

Suatu kenyataan terhadap bahwa suatu masyarakat selama hidupnya akan mengalami perubahan-perubahan. Perubahan kehidupan yang terjadi dalam masyarakat membawa masyarakat pada suatu kondisi yang

tidak menentu, persaingan kehidupan yang ketat merubah pola hidup masyarakat yang konsumtif serta adanya benturan sosial lainnya dalam menghadapi perubahan zaman yang begitu cepat menjadi suatu faktor yang mendorong dan menjadi penyebab munculnya berbagai tindak pidana atau kejahatan dalam masyarakat salah satunya yaitu pencurian kendaraan bermotor.

Kecenderungan melakukan pencurian dengan delik apapun, namun dalam beberapa kasus pencurian dilakukan dalam waktu tertentu, yaitu melibatkan kondisi dimana setiap orang akan mencari waktu yang tepat dalam melakukan aksi. Modus Operandinya dari beberapa pengamatan terhadap kasus-kasus tampak bahwa kejadian pencurian yang sangat rawan terhadap perilaku pencurian adalah diwaktu malam hari, sehingga hampir setiap saat diwaktu malam seluruh komponen masyarakat cenderung menyiapkan berbagai cara untuk mengatasi atau meminimalkan peluang pencurian.

Pencurian merupakan kejahatan yang sangat mengganggu kenyamanan masyarakat. Untuk itu perlu sebuah tindakan konsisten yang dapat menegakan hukum sehingga terjalin kerukunan. Kemiskinan yang banyak mempengaruhi perilaku pencurian adalah kenyataan yang terjadi ditengah masyarakat ini dapat dibuktikan dari rasio pencurian yang makin meningkat ditengah kondisi obyektif pelaku dalam melakukan aktifitasnya. Kondisi ini dapat berdampak pada beberapa aspek yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan kehidupan pelaku tersebut. Namun sejauh mana aktivitas

itu dapat memberikan nilai positif dalam membangun masyarakat yang taat hukum.

Saat ini yang terjadi adalah objektivitas penegakan hukum terasa masih jauh dari harapan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari peradilan yang tidak jujur, hakim-hakim yang terkontamiasi oleh kondisi pelaku pemerintah yang tidak konsisten, pengacara yang mengerjai rakyat, ketidakpercayaan pada lembaga yudikatif serta penegak hukum lainnya yang tidak menjelaskan perannya sebagai pelindung dan pengayom rakyat. Hal ini berdampak pada tatanan kehidupan masyarakat yang tidak lagi menganggap hukum sebagai jaminan keselamatan didalam enteraksi sesama warga masyarakat.

Berbagai kasus merebak sejalan dengan tuntutan akan perubahan, yang dikenal dengan istilah reformasi. Tampak diberbagai lapisan masyarakat dari tingkat atas sampai bawah terjadi penyimpangan hukum. Pembangunan masyarakat hukum madani merupakan tatanan hidup masyarakat yang memiliki kepatuhan terhadap nilai-nilai hukum. Akan tetapi dalam perjalanan perubahan terdapat sejumlah ketimpangan hukum yang dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat.

Berbagai kasus merebak sejalan dengan tuntutan perubahan yang dikenal dengan reformasi termasuk tuntutan hidup, seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi yang makin pesat dan canggih. Namun dalam perjalanan dan prosesnya terjadi suatu ketimpangan atau

pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian masyarakat. Salah satu diantaranya adalah pencurian, baik dari tingkat masyarakat lapisan bawah sampai pada pencurian besar-besaran yang dilakukan oleh pejabat dengan korupsi. Dalam sejarah peradaban manusia, pencurian sudah terjadi cukup lama. Pencurian dilakukan dengan berbagai cara, dari cara yang tradisional sampai pada pencurian yang dilakukan dengan cara-cara modern.

Pencurian sebagai salah satu bentuk kejahatan merupakan masalah sosial yang sulit dihilangkan, oleh karena itu manusia dalam menjalani kehidupannya dalam bermasyarakat dan kebutuhan yang semakin meningkat hal inilah yang memicu terjadinya suatu kasus pencurian. Terjadinya pencurian dalam masyarakat merupakan suatu kenyataan sosial yang tidak berdiri sendiri melainkan dipengaruhi oleh beberapa unsur struktur sosial tertentu dalam masyarakat, unsur itu misalnya kebutuhan yang semakin meningkat, susahny mencari pekerjaan, adanya peluang bagi pelaku, ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku pencurian kendaraan bermotor.

Akhir-akhir ini hampir setiap hari terdengar tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dimana tindakan ini telah meresahkan dalam lingkungan masyarakat biasanya kasus pencurian ini terjadi di tempat-tempat yang ramai seperti tempat parkir, di pinggir jalan mengingat tindak pidana pencurian ini sudah sangat sering terdengar atau terlihat diberita kriminal atau ada mungkin diantara kita yang menjadi korbannya, bahkan



tidak sedikit tindak pidana pencurian bermotor ini menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.

Pelaku tindak pidana pencurian pun tidak tanggung-tanggung dilakukan oleh orang masih di bawah umur, dimana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia orang yang di bawah umur ini dikategorikan sebagai Anak. maraknya pencurian yang dilakukan oleh Anak seringkali ditengarai oleh kondisi Psikologi yang belum stabil ditambah adanya ajakan maupun bujukan bahkan paksaan dari orang dewasa.

Maka hakim harus pintar dalam memutuskan hukuman yang dapat membuat pelaku merasa jera dengan tindakan yang tegas dan ketelitian aparat penegak hukum dalam memberikan sanksi khususnya pada kasus-kasus pencurian yang terjadi di kabupaten Jeneponto. Tindak pidana pencurian ini tidak mungkin dihapuskan secara tuntas jadi usaha yang harus dilakukan oleh masyarakat dalam menghadapi kejahatan haruslah sabar dan berhati-hati, yang berarti bahwa usaha itu bertujuan untuk mengurangi intensitas dan frekuensi terjadinya pencurian apalagi dengan semakin meningkatnya frekuensi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang terjadi dilingkungan masyarakat di kabupaten Jeneponto.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji hal tersebut dalam bentuk karya ilmiah dengan judul **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor:09/pid.sus/2014/PN.Jnp).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas maka dapat ditarik beberapa masalah yang menarik untuk dikaji, yaitu :

1. Bagaimanakah penerapan hukum terhadap tindak pidana pencurian Sepeda Motor yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Jeneponto Nomor: 09/PID.SUS/2014/PN.Jnp?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian Sepeda Motor yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Jeneponto Nomor:09/PID.SUS/2014/PN.Jnp?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Sebagaimana lazimnya setiap penulisan karya ilmiah tentunya mempunyai beberapa tujuan. Adapun tujuan-tujuan tersebut adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana pencurian Sepeda Motor yang dilakukan oleh Anak di Kabupaten Jeneponto Nomor:09/PID.SUS/2014/PN.Jnp.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian Sepeda Motor yang dilakukan oleh Anak di Kabupaten Jeneponto Nomor: 09/PID.SUS/2014/PN.Jnp.

Penelitian ini juga diharapkan dapat membawa kegunaan di masa-masa yang akan datang. Adapun kegunaan yang diharapkan adalah:

1. Dari segi teoritis

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai bahan atau data informasi di bidang ilmu hukum bagi kalangan akademis untuk mengetahui perkembangan hukum pidana serta proses penanganannya, dalam hal ini masalah tindak pidana pencurian khususnya pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Anak. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi penyempurnaan pranata peraturan hukum dalam penanggulangan tindak pidana pencurian.

2. Dari segi praktis

Peraturan-peraturan yang berlaku di negeri ini telah kita ketahui bersama bahwa terkadang terdapat kekurangan-kekurangan dari materi muatan dari peraturan itu sendiri sehingga penulis berharap agar dengan adanya karya ini dapat memberikan sumbangsi pemikiran untuk sedikit menyamakan persepsi demi terciptanya tujuan hukum.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Tinjauan Yuridis**

Tinjauan yuridis merupakan tinjauan yang berupa hukum, sedangkan hukum yang kita kaji disini adalah hukum menurut ketentuan pidana. Khusus dalam tulisan ini yang dimaksud tinjauan yuridis adalah suatu kajian hukum yang membahas mengenai penerapan hukum kepada pelaku tindak pidana dan apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap suatu perkara.

#### **B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana**

##### **1. Pengertian Hukum Pidana**

Menurut Kansil<sup>1</sup>, hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.

Sedangkan menurut sudarto<sup>2</sup>, hukum pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikatkan kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.

Selain itu sudarto juga berpendapat bahwa pada dasarnya hukum pidana berpokok 2 (dua) hal, yaitu :

---

<sup>1</sup> Kansil, 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. Hlm.89

<sup>2</sup> Sudarto, 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. Hlm.100

1. Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu

Dimaksudkan perbuatan yang dilakukan oleh orang, yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan semacam itu dapat di sebut “perbuatan yang dapat dipidana” atau disingkat” perbuatan jahat” (Verbrechen atau crime).

2. Pidana

Dimaksudkan bahwa penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu<sup>3</sup>. Istilah pidana harus dikaitkan dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau yang biasa disebut asas nullum delictum nullapoenae sine praevia lege poenale yang diperkenalkan oleh Anselm Von ferbach, yang berbunyi sebagai berikut : tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya<sup>4</sup>.

Menurut Bambang Poernomo<sup>5</sup> hukum pidana adalah hukum sanksi, yaitu:

1. Hukum pidana adalah hukum sanksi.

Maksudnya bahwa hukum tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum yang lain dan

---

<sup>3</sup> Sudarto, 1990. *Hukum Pidana I*. Yayasan Sudarto. Semarang. Hlm.9

<sup>4</sup> Andi Hamzah, 1993. *Peranan Hukum dan Peradilan*. Bina Aksara. Jakarta. Hlm.2

<sup>5</sup> Bambang Poernomo, 1989. *Prinsip Penerapan Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. Hlm.19

sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma di luar hukum pidana.

2. Hukum pidana dalam arti :

- a) Obyektif ( ius poenale) meliputi :
  - (1) Pemerintah dan larangan yang pelanggaranannya diancam dengan sanksi pidana oleh badan yang berhak.
  - (2) Ketentuan-ketentuan yang mengatur upaya yang dapat di pergunakan.
  - (3) Aturan –aturan yang menentukan kapan dan dimana berlakunya norma-norma tersebut.
- b) Subyektif (ius puniendi) yaitu hak Negara menuntut hukum untuk menuntut pelanggaran delik dan untuk menjatuhkan serta melaksanakan pidana.

3. Hukum pidana dibedakan dan di berikan arti menurut Van Apeldoorn<sup>6</sup>, yaitu:

- a) Hukum pidana materil menunjuk pada tindakan-tindakan yang oleh undang-undang dengan tegas dinyatakan dapat dikenai hukuman.
- b) Hukum pidana formil (hukum acara pidana) mngatur cara bagaimana pemerintah menjaga kelangsungan pelaksanaan hukum pidana materil.

4) Hukum pidana dibedakan diberikan arti sebagai:

---

<sup>6</sup> Van Apeldoorn, 1976. *Pengantar Ilmu Hukum*. Pradnya Paramita. Jakarta. Hlm.336,347

a) Hukum pidana umum

Memuat peraturan yang berlaku untuk setiap orang. Contoh: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

b) Hukum pidana khusus

Memuat peraturan untuk perbuatan – perbuatan khusus. Contoh: Undang-Undang Korupsi, Undang-Undang Psikotropika.

Menurut Sudarto<sup>7</sup>, hukum pidana dapat di bagi menjadi hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materil memuat aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, aturan-aturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana dan ketentuan mengenai pidana. Sedangkan hukum pidana formil mengatur bagaimana Negara dengan perantaraan alat-alat perlengkapannya melaksanakan haknya untuk mengenakan pidana.

## **2 . Tujuan Pidana**

Tujuan pidana dari mulai pembalasan (revenge) atau untuk tujuan memuaskan pihak-pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan, masih dianggap primitif. Tujuan pidana lainnya yang

---

<sup>7</sup> Op.Cit. Hlm.10

masih dianggap primitif adalah penghapusan dosa (expiation) atau retribusi (retribution) yaitu melepaskan pelanggar hukum dari perbuatan jahat atau menciptakan balasan antara yang hak dan yang batil. Perkembangan tujuan penjatuhan hukuman dalam hukum pidana ialah untuk melindungi dan memelihara ketertiban hukum guna mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai satu kesatuan ( for the public as a whole ). Hukum pidana tidak hanya melihat penderitaan korban atau penderitaan terpidana, tetapi melihat ketentraman masyarakat sebagai satu kesatuan yang utuh<sup>8</sup>.

Terdapat berbagai teori yang membahas alasan- alasan yang membenarkan (justification) penjatuhan hukuman atau sanksi. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Teori absolut dan mutlak (Vergeldingstheorie)

Hukuman itu dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat. Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena itu telah melakukan kejahatan tidak dilibatakibat-akibat apapun dari

---

<sup>8</sup> Leden Marpaung, 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. Hlm.4-5

dijatuhkan pidana. Tidak dipedulikan apa masyarakat dirugikan, hanya dilihat kemasa lampau, tidak dilihat ke masa depan<sup>9</sup>.

Perkembangan tujuan pidana ialah variasi dari bentuk – bentuk penjeraan baik ditunjukkan pada pelanggar hukum, maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat, pelindung hukum kepada masyarakat dari perbuatan jahat, perbaikan kepada diri penjahat.<sup>10</sup>

## 2) Teori Relatif atau Nisbi (Doeltheorie)

Prevensi khusus yang dianut oleh Van Hamel (Belanda) mengatakan bahwa tujuan prevensi khusus ialah mencegah niat buruk pelaku (dader) bertujuan mencegah pelanggar mengulangi perbuatannya atau mencegah bakal pelanggar melaksanakan perbuatan jahat direncanakannya. Van Hamel menunjukkan bahwa prevensi suatu pidana ialah:

- a) Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak, melaksanakan niat buruknya.
- b) Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana.
- c) Pidana harus mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki.

---

<sup>9</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2002. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*. PT. Eresco. Bandung. Hlm.21

<sup>10</sup> Op.Cit. Hlm.25



d) Tujuan satu-satunya pidana ialah mempertahankan tata tertib hukum<sup>11</sup>.

Menurut Herbert dan Thomas Aquino mengatakan bahwa apabila kejahatan tidak dibalas dengan pidana maka timbullah perasaan tidak puas. Memidana penjahat adalah suatu keharusan menurut estetika, dan menurut estetika penjahat harus dipidana seimbang dengan penderitaan korbannya. Hal ini ditentang oleh Hazewinkel Suringa bahwa perasaan hukum / sentiment belaka pada rakyat tidak boleh menjadi dasar pidana<sup>12</sup>.

Suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana, untuk ini tidaklah cukup suatu kejahatan, melainkan harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau si penjahat sendiri. Tidak dilihat pada masa lampau, melainkan juga masa depan<sup>13</sup>.

Tujuan lebih jauh dari pidana tidak hanya pemidanaan penjahat akan tetapi bagaimana penjahat dapat jera dari kejahatannya atau tidak mengulangi perbuatannya (prevensi), sehingga masyarakat tidak resah. Prevensi ini dibedakan: prevensi umum yang dijatuhkan pada masyarakat agar tidak melakukan

---

<sup>11</sup> Op.Cit.Hlm.31

<sup>12</sup> Op.Cit. Hlm.28 (diragukan)

<sup>13</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2002. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*. PT.Eresco. Bandung. Hlm.23

kejahatan, prevensi khusus yang ditujukan pada penjahat agar benar-benar jera.

Adapun teori relatif atau nisbi dilandasi oleh tujuan sebagai berikut:

a) Menjerakan

Dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulang lagi perbuatannya (*speciale preventie*) serta masyarakat umum mengetahui jika melakukan perbuatan yang dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman serupa (*generale preventie*).

b) Memperbaiki pribadi terpidana

Berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna.

c) Membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya.

Membinasakan berarti menjatuhkan hukuman mati, sedangkan membuat terpidana tidak berdaya dilakukan dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup.

### 3) Teori Gabungan ( Verenigingstheorie )

Menurut Van Bemelen<sup>14</sup>, teori gabungan adalah pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat tidaklah bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan, jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat. Teori gabungan dibagi menjadi tiga, yaitu: menitikberatkan unsur pembalasan; menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat; menitikberatkan pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.

### 3. Jenis-jenis Pidana

Jenis-jenis pidana tercantum dalam Pasal 10 KUHP dimana dibedakan atas pidana pokok dan pidana tambahan, yaitu:

- 1) Pidana pokok
  - a) Pidana mati
  - b) Pidana penjara
  - c) Pidana kurungan
  - d) Denda
  - e) Tutupan ( diatur dalam Undang-Undang 20 Tahun 1946 tentang hukuman tutupan )

---

<sup>14</sup> Op.Cit. Hlm.31-33

## 2) Pidana tambahan

- a) Pencabutan hak-hak tertentu
- b) Perampasan barang-barang tertentu
- c) Pengumuman putusan hakim

## C. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah delik atau *het strafbaarfeit* dalam ilmu hukum memiliki banyak pengertian maupun terjemahan-terjemahan yang bermakna serupa. Terjemahan tersebut diantaranya ada yang menyebutkan delik sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana.

Tindak pidana menurut wujud dan sifatnya adalah perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan terlaksananya interaksi sosial dalam masyarakat yang dianggap baik dan adil. Perbuatan yang anti sosial dapat juga dikatakan sebagai suatu tindak pidana.

Menurut **Moeljatno** "Perbuatan Pidana". Beliau tidak menggunakan istilah Tindak Pidana. Perbuatan Pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Moeljatno, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineke Cipta, Jakarta, Hlm : 06

Berdasarkan definisi diatas Moeljatno menjabarkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar)

Menurut **Simons**<sup>16</sup>, bahwa *Strafbaar feit* ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan yang dimaksud Simons adalah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa late* (alpa dan lalai).

**Van Hattum**<sup>17</sup>, mengatakan bahwa perkataan strafbaar feit itu berarti *voor straf inaanmerking* komend atau *straf verdienen* yang juga mempunyai arti sebagai pantas untuk dihukum, sehingga perkataan *strafbaar feit* seperti yang telah digunakan oleh pembuat undang-undang di dalam KUHP itu secara eliptis, harus diartikan sebagai suatu tindakan, oleh karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum, atau *feit terzakevan hetwelkeen persoon strafbaar is*.

**Pompe**<sup>18</sup>, memberikan dua macam definisi, yaitu yang bersifat teoritis dan bersifat perundang-undangan. Definisi teoritis ialah pelanggaran norma (kaidah; tata hukum) yang diadakan karena

---

<sup>16</sup> P.A.F. Lamintang, 1997, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 181

<sup>17</sup> Ibid. Hlm. 185

<sup>18</sup> Ibid. Hlm. 182

kesalahan pelanggar, dan yang harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum demi menyelamatkan kesejahteraan umum. Demikianlah beberapa rumusan-rumusan tentang tindak pidana (*Strafbaar feit*) yang diberikan oleh para sarjana ahli dalam hukum pidana. Perbedaan-perbedaan istilah seperti ini hanya menyangkut terminologi bahasa yang ada serta untuk menunjukkan tindakan hukum apa saja yang terkandung didalamnya.

Perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum juga pernah menggunakan istilah *strafbaar feit* sebagai berikut:

- a. Tindak Pidana, Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.
- b. Peristiwa hukum, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya Mr.R.Tresna dalam bukunya asas-asas hukum pidana, Van Schravendijk dalam buku pelajaran tentang hukum pidana Indonesia, Zainal Abidin dalam buku hukum pidana.
- c. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam buku pokok-pokok hukum pidana yang ditulis oleh Tirtamidjaja. Istilah ini banyak dijumpai dalam peraturan tentang kepabeanan.
- d. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Karni dan *Schravendijk*.
- e. Perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan oleh pembentuk Undang-Undang dalam Undang-Undang No. 12 / Drt / 1951 tentang senjata api dan bahan peledak.

- f. Perbuatan Pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya saat beliau menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang atau diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada orang-orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu<sup>19</sup>.

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Dari rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya 2 (dua) unsur tindak pidana, yaitu:<sup>20</sup>

- a. Unsur obyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :
- Sifat melanggar hukum;
  - Kualitas dari si pelaku
  - Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.
- b. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :
- Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus dan culpa)
  - Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;

---

<sup>19</sup> Moeljatno R. *Asas-Asas Hukum pidana*, 2008, Jakarta. hlm 59.

<sup>20</sup> PAF. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT.Citra Aditya Bakti. Bandung, Hlm : 193-194.

- Perasaan takut atau stress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Terhadap perbuatan tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan (*misdrijven*) menunjuk pada suatu perbuatan, yang menurut nilai-nilai kemasyarakatan dianggap sebagai perbuatan tercela, meskipun tidak diatur dalam ketentuan undang-undang. Oleh karenanya disebut dengan *rechtsdelicten*.

Sedangkan pelanggaran menunjuk pada perbuatan yang oleh masyarakat dianggap bukan sebagai perbuatan tercela. Diangkatnya sebagai perbuatan pidana karena ditentukan oleh undang-undang. Oleh karenanya disebut dengan *wetsdelicten*.

### **3. Jenis - jenis Tindak Pidana**

Tindak pidana dapat di beda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:

- 1) Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan dimuat dalam buku II dan pelanggaran dimuat dalam buku III. Kejahatan umumnya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pada pelanggaran.
- 2) Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana materil adalah tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana yang dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang



mengakibatkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu, sedangkan tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dimaksudkan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.

3) Berdasarkan bentuk kesalahannya, dapat antara tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja.

4) Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan antara tindak pidana aktif / pasif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana positif / negatif, disebut juga tindak pidana omisi.

5) Kesengajaan dan kealpaan

Kesengajaan adalah delik yang dilakukan dengan sengaja seperti Pasal 338 KUHP, sedangkan kealpaan adalah delik yang terjadi karena tidak sengaja atau lalai, contoh Pasal 359 KUHP<sup>21</sup>.

6) Delik yang berdiri sendiri dan Delik yang diteruskan

Delik yang berdiri sendiri adalah delik yang terdiri dari satu atau lebih tindakan untuk menyatakan suatu kejahatan, contoh pencurian Pasal 362 KUHP, delik yang diteruskan adalah delik-delik yang ada hakekatnya merupakan suatu kumpulan dari beberapa delik yang berdiri sendiri, contoh Pasal 221,261,282 KUHP<sup>22</sup>.

---

<sup>21</sup> P.A.F. LAmintang, 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Cipta Aditya Bakti. Bandung. Hlm.214

<sup>22</sup> Ibid Hlm.216

#### 7) Delik Tunggal dan Delik Berangkai

Delik tunggal merupakan delik yang dilakukan hanya satu perbuatan untuk terjadi delik itu. Sedangkan delik berangkai merupakan delik yang dilakukan lebih dari satu perbuatan untuk terjadinya delik itu<sup>23</sup>.

#### 4. Tempat dan Waktu Tindak Pidana

Untuk dapat menentukan secara pasti tentang waktu dan tempat kejadian dilakukannya sesuatu tindak pidana itu tidaklah mudah. Hal ini disebabkan karena pada hakekatnya tindak pidana merupakan suatu tindakan manusia, dimana pada waktu melakukan tindakannya seringkali manusia telah menggunakan alat yang dapat bekerja atau dapat menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain dimana orang tersebut telah menggunakan alat-alat yang bersangkutan. Dapat pula terjadi bahwa perbuatan dari seorang pelaku telah menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain dari pada waktu dan tempat dimana pelaku tersebut telah melakukan perbuatannya. Jadi tempus delicti adalah waktu di mana terjadinya suatu tindak pidana dan yang dimaksud locus delicti adalah tempat tindak pidana berlangsung.

Menurut Van Bemmelen dalam buku Lamintang menerangkan bahwa yang harus dipandang sebagai tempat dan waktu dilakukannya tindak pidana itu pada dasarnya adalah tempat

---

<sup>23</sup> Andi Hamzah, 1993. Peranan Hukum dan Peradilan. Bina Aksara. Jakarta. Hlm.101

dimana seorang pelaku telah melakukan perbuatannya secara materil. Yang harus dianggap sebagai “locus delicti” itu adalah:

- a) Tempat dimana seorang pelaku itu telah melakukan sendiri perbuatannya.
- b) Tempat dimana alat yang telah dipergunakan oleh seorang itu bekerja.
- c) Tempat dimana akibat langsung dari sesuatu tindakan itu telah timbul.
- d) Tempat dimana akibat konstitutif itu telah timbul<sup>24</sup>.

#### **D. Tindak Pidana Pencurian**

##### **1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian**

Pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapatkan awalan “pe” dan akhiran “an” yang berarti mengambil secara diam-diam, sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh orang lain. Mencuri berarti mengambil milik orang lain secara melawan hukum, orang yang mencuri milik orang lain disebut pencuri. Pencurian sendiri berarti perbuatan atau perkara yang berkaitan dengan pencurian.

Seseorang dikatakan pencuri jika semua unsur yang diatur didalam pasal pencurian terpenuhi. Pemenuhan unsur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan itu hanyalah upaya minimal, dalam taraf akan masuk ke peristiwa hukum yang sesungguhnya.<sup>25</sup>

Didalam ketentuan KUHP Indonesia, Pasal 362 menyatakan :

---

<sup>24</sup> Ibid. Hlm.227

<sup>25</sup> Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana, Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Sinar Grafika. Jakarta, Hlm : 01

“barangsiapa mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”.

Dari ketentuan di atas, Pasal 362 KUHP merupakan pencurian dalam bentuk pokok. Semua unsur dari kejahatan pencurian di rumuskan secara tegas dan jelas, sedangkan pada Pasal-Pasal KUHP lainnya tidak disebutkan lagi unsur tindak pidana pencurian, akan tetapi cukup disebutkan nama, kejahatan pencurian tersebut disertai dengan unsur pemberatan atau peringanan.

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian**

Pencurian dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 362 KUHP : <sup>26</sup>

“barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termaksud kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900”.

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur pada Pasal 362 KUHP terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

- (a) Barangsiapa,
- (b) Mengambil
- (c) Sesuatu barang, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain,
- (d) Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.

---

<sup>26</sup> R.Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar*. Politea. Bogor, Hlm : 249

Agar seorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian, orang tersebut harus terlebih dahulu terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian yang terdapat didalam rumusan Pasal 362 KUHP :

a) Barangsiapa

Seperti telah diketahui unsur pertama dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 362 KUHP itu adalah yang lazim di terjemahkan orang kedalam bahasa Indonesia dengan kata barangsiapa,atau terhadap siapa saja yang apabila ia memenuhi semua unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, maka karena bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut, ia dapat dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau pidana denda setinggi-tingginya Sembilan ratus rupiah.

b) Mengambil

Unsur yang kedua dari tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP ialah wegnehmen atau mengambil. Perlu kita ketahui bahwa baik undang-undang maupun pembentukan undang-undang ternyata tidak pernah memberikan sesuatu penjelasan tentang yang dimaksud dengan perbuatan mengambil, sedangkan menurut pengertian sehari-hari kata mengambil itu sendiri mempunyai lebih dari satu yakni :

1. Mengambil dari tempat dimana suatu benda itu semula berada
2. Mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain.

Menurut P.A.F. Laminating dan Theo Lamintang

“mengambil itu adalah suatu perilaku yang membuat suatu benda dalam penguasaannya yang nyata, atau berada dibawah kekuasaannya atau didalam detensinya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang ia inginkan dengan benda tersebut.”<sup>27</sup>

Selanjutnya P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang menjelaskan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada ditangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan orang lain. Didalam doktrin terdapat sejumlah teori tentang bilamana suatu perbuatan mengambil dapat dipandang sebagai telah terjadi, masing-masing yakni<sup>28</sup>:

#### 1. Teori Kontrektasi

Menurut teori ini adanya suatu perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa dengan sentuhan badaniah, pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempatnya semula, jadi dengan kata lain bahwa jika si pelaku (tindak pidana pencurian) telah memegang barang yang hendak ia curi dan barang tersebut telah memegang barang yang hendak ia curi dan barang tersebut telah berpindah tempat maka menurut teori ini pencurian telah terjadi.

---

<sup>27</sup> P.A.F. Laminating dan theo lamintang, 2009, *Delik-Delik Khusus, Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Sinar Grafika, Jakarta, Hlm: 13

<sup>28</sup> Ibid.

## 2. Teori Ablasi

Teori ini mengatakan untuk selesainya perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku, dengan kata lain bahwa jika barang yang hendak di curi oleh pelaku sudah diamankan, maka menurut teori ini pencurian telah terjadi.

Contoh : pelaku sudah mengantongi uang yang hendak dia curi

## 3. Teori Aprehensi

Menurut teori ini, untuk adanya perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam penguasaan yang nyata, dengan kata lain barang yang hendak ia curi sudah ia kuasai sepenuhnya dan kecil kemungkinan untuk diketahui

Contoh : pelaku yang sudah berada jauh dari tempat dimana ia mencuri dan barang yang hendak ia curi sudah berhasil ia amankan.

### c) Sesuatu barang, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Penjelasan barang karena sifatnya tindak pidana pencurian adalah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil harus berharga dimana harga ini tidak selalu bersifat ekonomis.

Barang yang diambil dapat sebagian dimiliki oleh sipencuri, yaitu apabila merupakan suatu barang warisan yang belum dibagi-bagi dan si pencuri adalah salah seorang ahli waris yang turut berhak atas barang itu.

Hanya jika barang itu tidak dimiliki oleh siapa pun, misalnya sudah dibuang oleh si pemilik, maka tidak ada tindak pidana pencurian.

Menurut R. Soesilo memberikan pengertian sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya.<sup>29</sup>

Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik” dan “gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan lewat kawat atau pipa. Barang disini tidak perlu mempunyai harga ekonomis.

Barang sebagai objek pencurian harus kepunyaan atau milik orang lain walaupun hanya sebagian saja. Hal ini memiliki pengertian bahwa meskipun barang yang di curi tersebut merupakan sebahagian lainnya adalah kepunyaan (milik) dari pelaku pencurian tersebut dapat di tuntutan dengan Pasal 362 KUHP.

Misalnya saja ada dua orang membeli sebuah sepeda motor dengan modal pembelian secara patungan, kemudian setelah beberapa hari kemudian salah seorang di antaranya mengambil sepeda motor tersebut dengan maksud dimilikinya sendiri dengan tidak seizin dan tanpa sepengetahuan rekannya maka perbuatan orang tersebut sudah di kategorikan sebagai perbuatan mencuri.

Dari contoh diatas dapat disimpulkan bahwa yang dapat menjadi objek tindak pidana pencurian hanyalah benda-benda yang ada pemiliknya saja,

---

<sup>29</sup> R. Soesilo, *Op.cit*, Hlm 250



sebaliknya bahwa barang-barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat dijadikan sebagai objek dari pencuri, misalnya binatang-binatang yang hidup di alam liar, dan barang-barang yang sudah dibuang oleh pemiliknya.

d) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Mengenai wujud dari memiliki barang baik Pasal 362 KUHP perihal pencurian., maupun Pasal 372 perihal penggelapan barang hal ini tidak sama sekali di tegaskan. Unsur “melawan hukum” ini erat berkaitan dengan unsur menguasai untuk dirinya sendiri. Unsur “melawan hukum” ini akan memberikan warna pada perbuatan “menguasai” itu menjadi perbuatan yang dapat dipidana. Secara umum melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum, baik itu hukum dalam artian objektif maupun hukum dalam artian subjektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

Memiliki secara melawan hukum itu juga dapat terjadi jika penyerahan telah terjadi karena perbuatan- perbuatan yang sifatnya melanggar hukum, misalnya dengan cara menipu, dengan cara memalsukan surat kuasa dan sebagainya.<sup>30</sup>

Berdasarkan uraian unsur- unsur pencurian di atas, apabila dalam suatu perkara tindak pidana pencurian unsur- unsur tersebut tidak dapat dibuktikan dalam pemeriksaan disidang pengadilan, maka majelis hakim akan menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa.oleh karena itu

---

<sup>30</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.cit*, Hlm. 33

proses pembuktian dalam persidangan perlu kecermatan dan ketelitian khususnya bagi penyidik dan jaksa penuntut umum dalam menerapkan unsur-unsur tersebut.

Setelah unsur-unsur Pasal 362 KUHP diketahui maka untuk melihat lebih jauh perbuatan seperti apa sebenarnya yang di larang dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, maka akan dilihat makna dari unsur-unsur. Patut kiranya dikemukakan, bahwa ciri khas pencurian ialah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki dengan cara melawan hukum.

Dengan melihat apa yang telah diuraikan diatas, maka penentuan umur seseorang yang belum akil baliq dan yang telah akil baliq menurut hukum islam sangatlah sukar sekali, sebab adanya tanda-tanda yang berlainan pada masing-masing individu untuk lebih memperjelas mengenai kelompok umur ini, dapat diketahui dengan mengemukakan beberapa kelompok umur ini, dapat diketahui dengan mengemukakan beberapa segi tinjauan antara lain dari segi pandangan biologis menunjukkan bahwa:

1. Umur 0 sampai 1 tahun disebut masa bayi
2. Umur 1 sampai 12 tahun disebut masa anak-anak
3. Umur 12 sampai 15 tahun disebut masa puber
4. Umur 15 sampai 21 tahun disebut masa pemuda
5. Umur 21 tahun keatas sudah berada pada tingkat dewasa.

Dari segi pandangan ini, maka masa remaja dapat ditandai dengan ketentuan umur seperti disebut diatas, disamping itu adalah dengan semakin sempurnanya organ-organ tubuhnya, hal ini biasanya terjadi pada umur 13 sampai 20 tahun. Jadi antara ketentuan umur dengan perkembangan organ-organ tubuh dapat ditarik kesimpulan bahwa masa remaja yaitu antara 12 tahun sampai 20 tahun. Sudut pandang yuridis, undang-undang menyebut batas umur sesuai dengan permasalahan yang diatur. Hal ini dapat dilihat dari beberapa ketentuan yang dirumuskan dalam undang-undang lainnya, yakni:

1. Untuk bidang ketenagakerjaan, seseorang diperlukan sebagai anak sampai batas umur maksimum 16 tahun.
2. Untuk proses perdata dan kepentingan kesejahteraan sosial, seseorang diperlukan sebagai anak sampai batas umur 21 tahun
3. Untuk proses pidana diperlukan sebagai anak sampai batas umur belum mencapai 18 tahun.

Uraian tersebut diatas dapat dilihat bahwa tidak adanya istilah remaja, melainkan istilah anak dengan batasan umur sebagaimana tersebut diatas, beberapa undang-undang kesejahteraan anak, misalnya menganggap semua orang di bawah usia 21 tahun dan belum menikah sebagai anak-anak oleh karenanya berhak mendapat perlakuan dan kemudahan-kemudahan yang diperlukan bagi anak. Mengenai penjelasan

tentang pengertian anak tidak ada keseragaman, bahkan terkesan sangat variatif tergantung dari sudut mana kita memilihnya, sehingga dalam perumusannya masih di temukan pengertian yang berbeda-beda. Darwan Prints<sup>31</sup>, menguraikan beberapa pengertian anak, yaitu:

a) Anak Menurut Hukum Adat

Menurut hukum adat tidak ada batasan umur yang pasti bilamana dikatakan seseorang itu masih dibawah umur atau tidak, hal ini dapat dilihat dari ciri-ciri Ter Haar dalam bukunya “BEGINSELLEN ENSTELSEL VAN HET ADATRECHT”

Mengatakan:

*“Seseorang sudah dewasa menurut hukum adat di dalam persekutuan hukum yang kecil adalah pada seseorang baik perempuan maupun laki-laki apabila dia sudah kawin dan disamping itu telah meninggalkan orang tuanya ataupun rumah mertua dan pergi pindah mendirikan kehidupan rumah keluarganya sendiri”<sup>32</sup>.*

b) Anak menurut Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

Dalam Pasal 1 (3) Undang-undang No.11 Tahun 2012 Undang-undang No.1 Tahun 1974 sistem peradilan pidana anak sebagai berikut :

---

<sup>31</sup> Darwan Prints, Bandung. Hukum Anak Indonesia, PT.Citra Aditya. 2003. Hal.2-3

<sup>32</sup> Datuk Usman, Medan, *Diktat Hukum Adat*, Bina Sarana Balai Pemnas SU, 1984, Hlm.8

“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

c) Anak menurut Undang-undang Kesejahteraan Anak

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang

Kesejahteraan Anak mendefinisikan anak sebagai berikut :

“Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”

d) Anak menurut Konvensi Hak-hak Anak

Dalam Pasal 1 Konvensi tentang Hak-hak Anak tanggal 20

November 1989 mendefinisikan anak sebagai berikut :

“Untuk tujuan-tujuan Konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur delapan belas tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”

e) Anak menurut Undang-undang Permasalahatan

Dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang No.12 Tahun 1995 tentang

Permasalahatan membagi 3 istilah anak sebagai berikut :

Anak Didik Permasalahatan adalah :

- 1) Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- 2) Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada Negara untuk dididik dan ditempatkan di

LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;

3) Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

f) Anak menurut Undang-undang Pengadilan Anak

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Pengadilan Anak No.3

Tahun 1997 mendefenisikan anak sebagai berikut :

“Anak adalah orang dalam perkara anak yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah”.

h) Anak menurut putusan No.1/PUU-VIII/2010 tertanggal 24 februari 2011;

“batas minimum usia seorang anak dapat diadili di pengadilan dari 8 tahun menjadi 12 tahun”

i) Anak menurut Undang-undang Hak Asasi Manusia

Dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 39 tahun 1999

tentang Hak Asasi Manusia mendefenisikan anak sebagai berikut :

“Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingan”

j) Anak menurut Undang-undang Perlindungan Anak

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 tahun 2002

tentang Perlindungan Anak mendefenisikan anak sebagai berikut :

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”

k) Anak menurut Hukum Ketenagakerjaan

Dalam Pasal 1 angka 26 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mendefinisikan anak sebagai berikut :

“Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun”

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dengan Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak memiliki hubungan antara satu sama lain, yaitu merupakan hubungan hukum khusus dan hukum umum. Undang-Undang Pengadilan Anak sebagai hukum khusus (*lex specialis*), sedang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) merupakan hukum umum (*lex generalis*). Dalam hal anak melakukan tindak pidana, peraturan perundang-undangan yang dijadikan acuan dalam proses penanganannya adalah Undang-Undang Pengadilan Anak.

Mengenai ketentuan pidana materiil tersebut dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ternyata sudah mencabut ketentuan Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sehingga ketentuan-ketentuan tersebut sudah tidak berlaku lagi. Jadi, berdasarkan asas hukum “*lex specialis derogat legi generalis*” maka dengan demikian

dalam mengadili perkara anak, penggunaan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 didahulukan dari peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Namun jika tidak diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang merupakan ketentuan hukum umumnya.

### **3. Jenis-jenis Tindak Pidana Pencurian**

Ditinjau dari jenisnya, pencurian dari KUHP ada beberapa macam, yaitu :

#### **a. Pencurian Biasa**

Biasa adalah pencurian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal-Pasal 362 KUHP yang memiliki unsur sebagai berikut:

##### **1) Mengambil barang**

Mengambil barang merupakan unsur obyektif dari tindak pidana pencurian menurut rumusan Pasal 362 KUHP. Kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain<sup>33</sup>. Unsur yang dilarang dan diancam dengan hukuman dalam kejahatan ini adalah perbuatan mengambil, yaitu membawa

---

<sup>33</sup> Wirdjono Prodjodikoro, 1986. *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. PT.Eresco. Hlm15



sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata<sup>34</sup>.

Pada pengertian mengambil barang, yaitu memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, ini tersirat pula terjadinya penghapusan atau peniadaan penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang tersebut, namun dalam rangka penerapan pasal ini tidak dipersyaratkan untuk di buktikan. Karena seandainya kemudian si pelaku tertangkap dan barang itu di kembalikan kepada si pemilik asal.

2) Barang yang seluruh atau sebagaian kepunyaan orang lain

Pengertian barang juga telah mengalami proses perkembangan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan sebagai atau bergerak, tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai dalam kehidupan ekonomi seseorang. Barang tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhan karena sebagaian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian. Barang tidak ada pemiiknya tidak dapat menjadi obyek pencurian.

3) Dengan maksud untuk memiliki barang bagi diri sendiri secara melawan hukum

---

<sup>34</sup> P.A.F. Lamintang dan C.Djasman Samosir, 1981. *Delik-delik Khusus*. Tarsito. Bandung. Hlm.148

Perbuatan memiliki adalah si pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya merupakan milik orang lain. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu: menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubah dan sebagainya. Jadi setiap penggunaan barang yang dilakukan pelaku seakan-akan sebagai pemilik. Maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat dipergunakan, misalnya sudah tertangkap tangan terlebih dahulu, karena kejahatan pencurian telah selesai apabila perbuatan mengambil barang telah selesai.

b. Pencurian dengan pemberatan

Pencurian dengan pemberatan yaitu dalam bentuk pokok sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP ditambah dengan unsur yang memberatkan sehingga diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu dengan pidana penjara selamanyanya 7 tahun. Rumusan dari Pasal 363 KUHP adalah sebagai berikut:

1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun

ke-1 pencurian ternak;

ke-2 pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam,

kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;

ke-3 pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

ke-4 pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

ke-5 pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

- 2) Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan ke-5 maka dikenakan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

c. Pencurian dengan Kekerasan

Pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP yaitu diancam hukuman penjara maksimum 9 tahun, pencuri yang didahului, disertai atau diiringi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang-orang dengan tujuan untuk mempersiapkan

atau mempermudah pencurian itu, atau pada keadaan tertangkap tangan supaya mempunyai kesempatan bagi sendiri atau orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu, untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap dalam kekuasaannya. Unsur-unsur dari Pasal 365 ayat (1), sebagai berikut:

1) Obyektif, yaitu:

- a) Pencurian dengan didahului, disertai, diikuti;
- b) Oleh kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang.

2) Subyektif, yaitu:

- a) Dengan maksud untuk;
- b) Mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau;
- c) Jika tertangkap tangan dengan memberi kesempatan bagi diri sendiri atau peserta lain dalam kejahatan itu;
- d) Untuk melarikan diri;
- e) Untuk mempertahankan pemilikan atas barang yang dicurinya.

Pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 ayat (2) KUHP yaitu apabila pencurian tersebut dilakukan:

Ke-1 pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup dimana berdiri sebuah rumah, di jalan umum, didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Ke-2 Dilakukan bersama-sama oleh 2 orang atau lebih;

Ke-3 yang bersalah memasuki tempat kejahatan dengan cara membongkar, memanjat, anak kunci palsu, perintah palsu, pakaian jabatan palsu;

Ke-4 jika perbuatannya mengakibatkan luka berat.

d. Pencurian ringan

Pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP, yang dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), asal harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp.25.-;
- 2) Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih (Pasal 363 ayat (1) sub 4 KUHP), asal harga barang tidak lebih dari Rp. 25,-dan;
- 3) Pencurian dengan masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang dicuri dengan jalan membongkar, memecah, memanjat, kunci palsu dan sebagainya asal:
  - a) Harga barang tidak lebih dari Rp.25,-dan
  - b) Tidak dilakukan dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Pasal ini praktis tidak berarti lagi, oleh karena pencurian ringan ini dahulu hanya ada hubungannya

dengan wewenang pengadilan “landgerecht”, yang sekarang sudah tidak ada lagi<sup>35</sup>.

e. Pencurian dalam kalangan keluarga

Pencurian dalam kalangan keluarga diatur dalam Pasal 367 KUHP yang isinya sebagai berikut:

- 1) Pencurian atau membantu pada pencurian atas kerugian suami atau istri sendiri tidak dihukum, oleh karena orang-orang itu sama-sama memiliki harta benda suami istri. bagi mereka yang tunduk pada peraturan perkawinan menurut sipil, dimana berlaku peraturan tentang cerai meja makan dan tempat tidur yang berarti perkawinan mereka masih tetap berlangsung, akan tetapi hanya kewajiban mereka untuk bersama-sama tinggal dalam satu rumah saja yang ditiadakan, jika ada pencurian terjadi atas kerugian suami istri sendiri yang telah bercerai meja makan itu, hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari suami atau istri yang dirugikan;
- 2) Pencurian atau membantu pencurian oleh keluarga sedarah atau keluarga karena perkawinan turunan lurus atau keluarga karena perkawinan turunan menyimpang dalam derajat kedua;
- 3) Jika menurut adat istiadat keturunan ibu kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari pada bapak kandung, maka

---

<sup>35</sup> M.Sudradjat Bassar, 1986. *Tindak-tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Remadja Karya. Bandung. Hlm.67

peraturan tentang pencurian dalam kalangan keluarga tersebut pada Pasal 367 ayat (2) KUHP berlaku pula pada orang itu, misalnya seorang kemenakan yang mencuri harta benda ibunya adalah delik aduan.

Berdasarkan Pasal 367 ayat (2) KUHP, apabila pelaku atau pembantu dari pencurian – pencurian dan Pasal 362 KUHP sampai dengan Pasal 365 KUHP adalah suami atau istri dari si korban dan mereka yang dibebaskan dari kewajiban berumah-bersama, atau keluarga semenda, baik dalam keturunan lurus maupun keturunan menyimpang sampai derajat kedua, maka terhadap orang itu sendiri hanya boleh dilakukan penuntutan atas pengaduan si korban pencurian<sup>36</sup>.

#### **E. Sanksi Pidana dan Tindakan Bagi Anak**

Sanksi adalah ancaman hukuman, satu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah, undang-undang, norma-norma hukum, akibat sesuatu perubahan atau suatu reaksi dari pihak lain atas sesuatu perbuatan.

Pidana dan jenis pidana penjatuan Pidana pada Persidangan Anak diatur dalam Pasal 22-32 Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 1997 dan dapat berupa pidana atau tindakan. Apabila diperinci lagi, pidana tersebut bersifat pidana Pokok dan Pidana Tambahan.

---

<sup>36</sup> Ibid. Hlm.68

## **1. Pidana Pokok**

Pidana Pokok bagi anak terdiri dari:

### **a. Pidana penjara**

Pasal 26 UU No.3 tahun 1997

Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

Apabila anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 tahun.

Apabila anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap anak tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b.

Apabila anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana penjara seumur hidup, maka terhadap anak tersebut dijatuhkan



salah satu tindakan sebagaimana di maksud dalam Pasal 24.

Secara universal, pidana penjara/gevangenisstraf merupakan pidana bersifat perampasan kemerdekaan pribadi terpidana karena penempatannya dalam bilik penjara. kalau dilihat dari bentuknya maka hukuman penjara dapat berupa seumur hidup untuk sementara. Hukuman penjara untuk sementara mempunyai rentang waktu *minimum/algemeene Straftmaxime* selama 15 (lima belas) tahun.

b. Pidana Kurungan

Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa.

c. Pidana Denda

Pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak paling banyak  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa.

Apabila pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata tidak dapat dibayar maka ganti dengan wajib latihan kerja.

Wajib latihan kerja sebagai pengganti denda dilakukan paling lama 90 (Sembilan puluh) hari kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari.

d. Pidana Pengawasan

Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.

Apabila terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, dijatuhkan pidana pengawasan sebagaimana dimaksud dalam (1), maka anak tersebut ditempatkan dibawah pengawasan jaksa dan bimbingan pembimbing kemasyarakatan.

Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana pengawasan diatur lanjut dengan peraturan pemerintah.

## **2. Pidana Tambahan**

a. Pidana Perampasan Barang-Barang Tertentu

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maka perampasan barang-barang tertentu tersebut berorientasi kepada:

- Milik terdakwa anak sendiri;

- Barang tersebut dipergunakan terdakwa anak untuk melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan
- Barang-barang tersebut diperoleh anak karena melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

b. Pembayaran Ganti Rugi

Menurut ketentuan Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 bahwa ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembayaran ganti rugi diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

### **3. Tindakan**

Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah:

- a. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh. Pada dasarnya, meskipun anak dikembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh, anak tersebut tetap dibawah pengawasan dan bimbingan pembimbing. Kemasyarakatan, antara lain mengikuti kegiatan kepramukaan dan lain-lain.
- b. Menyerahkan kepada anak Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau hakim dapat menetapkan anak tersebut ditempatkan di Lembaga Permasyarakatan Anak untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja dimaksudkan

untuk memberikan bekal kekal keterampilan kepada anak, misalnya dengan memberikan keterampilan mengenai pertukangan, pertanian, perbengkelan, tatarias, dan sebagainya sehingga setelah selesai menjalani tindakan dapat hidup mandiri.

- c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi sosial Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. Pasal 32 UU 3/1997 pada prinsipnya pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja diselenggarakan oleh Pemerintah di Lembaga Permasyarakatan Anak atau Departemen Sosial, tetapi dalam hal kepentingan anak yang bersangkutan diserahkan kepada Organisasi Kemasyarakatan, seperti pesantren, panti sosial, dan lembaga sosial lainnya dengan memperlihatkan agama anak yang bersangkutan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Sehubungan dengan data yang diperlukan dalam rencana penulisan ini maka penulis menetapkan lokasi penelitian pada Pengadilan Negeri Jeneponto. Alasan dipilihnya tempat tersebut sebagai lokasi penelitian adalah karena lokasi tersebut merupakan badan peradilan yang telah memeriksa dan mengadili tindak pidana yang penulis teliti, sehingga memudahkan penulis untuk dapat mencari data dan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.

#### **B. Jenis Dan Sumber Data**

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder:

##### **1. Data primer**

Data yang diperoleh melalui wawancara secara langsung dari responden yang berkaitan dengan penelitian dalam hal ini Hakim di Pengadilan Negeri Jeneponto.

##### **2. Data sekunder**

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan berupa literatur dan dokumen-dokumen, buku, makalah, serta peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan tertulis yang berkaitan erat dengan penelitian ini.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut :

#### **1. Penelitian Pustaka**

Penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan data sekunder, yaitu data yang didapatkan dengan menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan, karya tulis, makalah serta data yang didapatkan dari penelusuran melalui media internet atau media lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### **2. Penelitian Lapangan**

Penulis mengadakan penelitian secara langsung dengan wawancara dengan responden yang menangani kasus tersebut, dalam hal ini Hakim, atau ahli hukum yang memahami objek penelitian penulis untuk memperoleh suatu informasi yang benar sehingga menunjang penelitian ini.

### **D. Analisis Data**

Semua data yang dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder akan dianalisis secara kuantitatif yaitu uraian menurut mutu, yang berelasi dengan kenyataan sebagai gejala data primer yang dihubungkan dengan teori-teori dalam data sekunder. Data disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan dan mengumpulkan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penelitian ini.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Penerapan hukum terhadap tindak pidana pencurian Sepeda Motor yang dilakukan oleh Anak di Kabupaten Jeneponto Nomor: 09/PID.SUS/2014/PN.Jnp**

Tindak pidana merupakan tindakan melawan hukum yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh Undang-undang dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum. Oleh karena itu jika seseorang melakukan tindak pidana maka perbuatan tersebut harus dipertanggungjawabkan.

Dalam hal ini, penulis membahas kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak dalam Studi Kasus Putusan Nomor: 09/PID.SUS/2014/PN.Jnp yang didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu; Terdakwa melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

#### **1. Posisi Kasus**

Terdakwa ASRIANTO ALIAS ASRI BIN ARIFIN bersama-sama Lei.Iwan Bin Baso Tompo (DPO) pada Hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekitar Pukul.02.00 wita melakukan pencurian sepeda motor milik saksi Risal Bin Sahrir, sepeda motor milik saksi Agus Alias Boko Bin Baga dan sepeda motor milik saksi Basri Bin Ledeng yang saat itu

terparkir di kolong rumah saksi Basri Bin Ledeng dalam keadaan terkunci. Terdakwa ASRIANTO ALIAS ASRI BIN ARIFIN kemudian mengambil besi pencungkil di bengkel milik DANDI BIN RAHMAN, lalu mencungkil atau merusak papan atau dinding bagian depan dari pintu kolong rumah sehingga papannya terbuka. Terdakwa ASRIANTO ALIAS ASRI BIN ARIFIN dan Lei.Iwan Bin Baso Tompo (DPO) bersama-sama masuk ke dalam rumah tersebut dan mencari obeng. Setelah menemukan obeng dari salah satu motor yang hendak dicuri Terdakwa ASRIANTO ALIAS ASRI BIN ARIFIN kemudian menggunakan obeng tersebut untuk merusak kunci kontak sepeda motor Jupiter MX warna hitam lalu mendorongnya keluar rumah. Lei.Iwan Bin Baso Tompo (DPO) mengambil sepeda motor milik terdakwa Terdakwa ASRIANTO ALIAS ASRI BIN ARIFIN dan mengikutinya ke kampung Kua-kuala Kel.Togo-togo Kec.Batang Kab.Jeneponto. Setibanya di tempat tersebut terdakwa menyimpan atau memarkir sepeda motor yang telah diambil tersebut dekat jembatan kemudian ditutupi dengan daun-daun atau semak-semak yang sudah ditebang. Terdakwa ASRIANTO ALIAS ASRI BIN LEDENG bersama Lei.Iwan Bin Baso Tompo (DPO) kemudian kembali lagi ke kampung Beru desa balangloe kec.Tarowang. Terdakwa kembali masuk ke kolong rumah saksi Basri Bin Ledeng dan mengambil sepeda motor Smash warna hitam merah dengan cara merusak kunci kontaknya dengan menggunakan obeng sementara



Lei.Iwan Bin Baso Tompo (DPO) mengambil sepeda motor Jupiter Z. Terdakwa ASRIANTO ALIAS ASRI BIN ARIFIN lalu membawa lagi motor tersebut diikuti Lei.Iwan Bin Baso Tompo (DPO) ke kampung Kua-kuala Kel.Togo-togo Kec.Batang Kab.Jeneponto. Terdakwa hanya menyimpan sepeda motor smash yang diambilnya, sedangkan sepeda motor Jupiter Z yang digunakan Lei.Iwan Bin Baso Tompo (DPO) hendak disimpan ditempat lain. Terdakwa ASRIANTO ALIAS ASRI BIN ARIFIN bersama-sama Lei.Iwan Bin Baso Tompo (DPO) kemudian berboncengan namun dalam perjalanan motor tersebut rusak sehingga mesinnya tidak bisa dihidupkan lagi. Lalu terdakwa mendorong dan menyembunyikannya di arah kampung Pao Desa Pao Kec.Tarowang Kab. Jeneponto. Lei.Iwan Bin Baso Tompo (DPO) kemudian menghubungi DANDI BIN RAHMAN meminta tolong dijemput untuk pulang ke rumah Terdakwa. Pada hari yang sama Pukul.15.00 wita, Terdakwa ASRIANTO ALIAS ASRI BIN ARIFIN bersama-sama Lei.Iwan Bin Baso Tompo (DPO) pergi ke kampung Kua-kuala untuk melihat motor yang telah Terdakwa simpan sebelumnya. Terdakwa ASRIANTO ALIAS ASRI BIN ARIFIN membawa/mengambil motor Jupiter MX sedangkan Lei.Iwan Bin Baso Tompo (DPO) membawa/mengambil motor Suzuki Smash lalu membawanya ke rumah saksi MUH.ILHAM BIN RAMLI ke kompleks BTN PAM Taman Tirta Pelita Asri diKab.Gowa. Terdakwa kemudian menawarkan motor tersebut ke MUH.ILHAM BIN RAMLI namun karena surat-surat tidak

lengkap maka saksi MUH.ILHAM BIN RAMLI menolak untuk membelinya. Motor tersebut lalu dititip di rumah MUH.ILHAM BIN RAMLI kemudian Terdakwa Terdakwa ASRIANTO ALIAS ASRI BIN ARIFIN dan Lei.Iwan Bin Baso Tompo (DPO) pulang ke rumahnya di kampung beru kec.Tarowang. esok harinya, Minggu 13 april 2013 sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa ASRIANTO ALIAS ASRI BIN ARIFIN pergi melihat motor Jupiter Z kemudian melepas kap-kap serta lampu-lampu motor tersebut dan membuangnya ke Sungai Tarowang sedangkan mesin motornya terdakwa bawa ke bengkel Lei.Iwan Bin Baso Tompo untuk diperbaiki. Pada hari senin 14 April 2014 Pukul 21.00 wita Terdakwa ASRIANTO ALIAS ASRI BIN ARIFIN bertemu dengan saksi Muhammad Gurham Bin Muhammad Arsyad dan mengajaknya ke makassar. Setibanya di rumah saksi MUH. ILHAM BIN RAMLI di Kompleks BTN PAM Taman Tirta Pelita Asri di Kabupaten Gowa. Terdakwa ASRIANTO ALIAS ASRI BIN ARIFIN lalu mengambil sepeda motor Jupiter MX milik saksi Risal Bin Sahir dan membawanya kesamping menara jembatan Kembar lalu menyimpan/memarkirnya. begitupun dengan motor Smash milik Basri Bin Ledeng yang dibawa masuk ke dalam lorong/jalan samping jembatan kembar menuju dekat tempat sampah lalu menyimpan motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa ASRIANTO ALIAS ASRI BIN ARIFIN dan saksi Muhammad Gurham Bin Muhammad Arsyad pulang ke jeneponto pada saat itu juga. Akibat perbuatan terdakwa, Saksi Risal

Bin Sahir, Saksi Basri Bin Ledeng dan Saksi Agus Alias Boko Bin Baga mengalami kerugian secara keseluruhan kurang lebih sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).

## **2. Dakwaan Penuntut Umum**

Adapun surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu Dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yaitu jenis dakwaan yang terdakwa didakwa dengan satu perbuatan saja tanpa diikuti dengan dakwaan-dakwaan lain atau tanpa alternatif dakwaan lainnya terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ASRIANTO ALIAS ASRI BIN ARIFIN yang dibacakan pada persidangan dihadapan Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto sebagai berikut:

### **DAKWAAN TUNGGAL:**

Bahwa ia Terdakwa ASRIANTO ALIAS ASRI BIN ARIFIN bersama-sama Lei.Iwan Bin Baso Tompo (DPO), Pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira Pukul 02.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April 2014 bertempat di kolong rumah milik saksi Basri Bin Ledeng di Kampung beru Desa Balangloe Kec.Tarowang Kab.Jeneponto atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *“mengambil barang atau sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”* berupa 3 (tiga) Unit Sepeda Motor tanpa ijin atau sepengetahuan pemiliknya *“dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”* dengan cara *“merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci palsu,* dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh *“dua orang atau lebih dengan bersekutu”* yakni terdakwa ASRIANTO ALIAS ASRI BIN ARIFIN bersama-sama dengan Lei.Iwan Bin Baso Tompo (DPO).

**Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:**

- Bahwa hari sabtu tanggal 12 April 2014 sekitar Pukul 02.00 wita Terdakwa ASRIANTO ALIAS ASRI BIN ARIFIN bersama-sama Lei.Iwan Bin Baso Tompo (DPO) merencanakan akan melakukan pencurian sepeda motor milik saksi Risal Bin Sahrir, sepeda motor milik saksi Agus alias Boko Bin Baga, sepeda motor milik saksi Basri Bin Ledeng yang saat itu terparkir di kolong rumah saksi Basri Bin Ledeng di Kampung beru desa Balangloe Kec.Tarawang Kab.Jeneponto
- Bahwa adapun pada saat Terdakwa ASRIANTO ALIAS ASRI BIN ARIFIN dan Lei.Iwan Bin Baso Tompo (DPO) melihat di rumah saksi Basri Bin Ledeng mereka ketahui kemudian jika tempat sepeda motor tersebut disimpan di dalam Kolong rumah Saksi Basri bin Ledeng dalam keadaan terkunci, sehingga Terdakwa ASRIANTO ALIAS ASRI BIN ARIFIN pergi mengambil besi atau cangkil ban di bengkel milik Dandi Bin Rahman, adapun Lei.Iwan Bin Baso Tompo (DPO) berdiri disekitar kolong rumah untuk berjaga-jaga
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa ASRIANTO ALIAS ASRI BIN ARIFIN mengambil besi pencangkil, lalu mencangkil atau merusak papan atau dinding bagian depan dari pintu kolong rumah sehingga papannya terbuka, lalu terdakwa memasukkan tangannya dan mencari tempat Grandel (kunci pintu) lalu membukanya.
- Bahwa Terdakwa ASRIANTO ALIAS ASRI BIN ARIFIN dan Lei.Iwan Bin Baso Tompo (DPO) kemudian bersama-sama masuk ke dalam rumah tersebut, kemudian terdakwa mencari obeng dari salah satu motor yang hendak dicuri atau diambil dibagian sadel motornya, lalu setelah menemukan obeng terdakwa kemudian menggunakan obeng tersebut untuk merusak kunci kontak sepeda motor Jupiter MX warna Hitam kemudian Terdakwa dorong keluar rumah saksi Basri Bin Ledeng samil memasukkan persenelang/gigi hingga motor berbunyi sedangkan Lei.Iwan Bin Baso Tompo (DPO) mengambil sepeda motor Terdakwa ASRIANTO ALIAS ASRI BIN ARIFIN yang diparkir di depan rumah milik Dandi Bin Rahman, kemudian Lei.Iwan Bin Baso Tompo (DPO) mengikuti terdakwa pergi ke kampung Kua-kuala Kel.Togo-togo Kec.Batang Kab.Jeneponto. setibanya ditempat tersebut Terdakwa menyimpan atau memarkir sepeda motor yang telah diambil tersebut dekat jembatan kemudian ditutupi dengan daun-daun atau semak-semak yang sudah ditebang.
- Bahwa kemudian ASRIANTO ALIAS ASRI BIN ARIFIN dibonceng oleh Lei.Iwan Bin Baso Tompo (DPO) kembali lagi ke

kampung beru desa Balangloe Kec.Tarowang Kab.Jeneponto, pada saat tiba terdakwa terlebih dahulu memarkir motor milik terdakwa, lalu terdakwa masuk ke kolong rumah saksi basri bin Ledeng kemudian kembali mengambil sepeda motor Smash warna hitam merah dengan cara merusak kunci kontaknya dengan menggunakan obeng sedangkan Lei.Iwan Bin Baso Tompo (DPO) mengambil sepeda motor Jupiter Z yang saat itu dapat digunakan dengan kunci apa saja, lalu Terdakwa ASRIANTO ALIAS ASRI BIN ARIFIN mendorong sepeda motor smash tersebut diikuti Lei.Iwan Bin Baso Tompo (DPO) yang mendorong sepeda motor Jupiter Z hingga ke tempat sepi lalu kemudian menyalakan motor tersebut dan kembali dibawa ke kampung kua-kuala kel.Togo-togo Kec.batang Kab.Jeneponto.

- Bahwa adapun Terdakwa ASRIANTO ALIAS ASRI BIN ARIFIN hanya menyimpan sepeda motor smash yang diambilnya, sedangkan sepeda motor Jupiter Z yang digunakan Lei.Iwan Bin Baso Tompo (DPO) hendak disimpan ditempat lain. Sehingga Terdakwa bersama Lei.Iwan Bin Baso Tompo (DPO) berboncengan menggunakan motor tersebut melewati belakang pasar Tarowang, namun dalam perjalanan motor tersebut rusak sehingga tidak bias dihidupkan mesinnya, lalu terdakwa membuka rantai motor tersebut dan mendorongnya lalu disembunyikan di arah desa pao kec.Tarowang Kab.Jeneponto. lalu Lei.Iwan Bin Baso Tompo menghubungi Dandi Bin Rahman meminta tolong untuk dijemput, sehingga Dandi Bin Rahman Menggunakan motor milik Terdakwa ASRIANTO ALIAS ASRI untuk menjemput mereka untuk kemudian Pulang kerumah Terdakwa.
- Bahwa pada hari yang sama sekitar Pukul.15.00 wita Terdakwa ASRIANTO ALIAS ASRI BIN ARIFIN bersama-sama Lei.Iwan Bin Baso Tompo (DPO) menggunakan pete-pete pergi ke kampung kua-kuala untuk melihat sepeda motor yang telah terdakwa simpan sebelumnya dengan cara turun dari pete-pete sebelum jembatan dan berjalan kaki ke tempat sepeda motor tersebut di simpan, kemudian setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa ASRIANTO ALIAS ASRI BIN ARIFIN membawa/ mengambil sepeda motor Jupiter MX sedangkan Lei.Iwan Bin Baso Tompo (DPO) membawa/mengambil sepeda motor smash secara bersama-sama lalu membawanya ke rumah saksi Muh.Ilham Bin Ramli ke kompleks BTN PAM Taman Tirta Pelita Asri di kabupaten Gowa, adapun saat itu saksi Muh.Ilham Bin Ramli ditaawarkan oleh Terdakwa Sepeda Motor Tersebut, namun karena surat-surat motor tersebut tidak lengkap maka saksi Muh.Ilham Bin Ramli menolak untuk membelinya.
- Bahwa kemudian Terdakwa ASRIANTO ALIAS ASRI BIN ARIFIN meminta tolong kepada saksi Muh.Ilham Bin Ramli agar

sementara motor tersebut dititipkan di rumahnya kemudian Terdakwa ASRIANTO ALIAS ASRI BIN ARIFIN bersama-sama Lei.Iwan Bin Baso Tompo (DPO) kembali pulang ke rumahnya di kampung baru dengan menggunakan angkutan umum.

- Bahwa kemudian esok harinya, yakni hari minggu tanggal 13 April 2014 sekitar pukul 17.00 terdakwa pergi sendiri melihat sepeda motor Jupiter Z yang disimpan di arah jalan Kampung Pao desa Pao, lalu setibanya disana Terdakwa melepas kap-kap serta lampu-lampu motor tersebut dan membuangnya ke Sungai Tarowang sedangkan mesin motornya terdakwa bawa ke bengkel Lei.Iwan Bin Baso Tompo untuk diperbaiki.
- Bahwa pada hari senin tanggal 14 April 2014 pukul 21.00 terdakwa Terdakwa ASRIANTO ALIAS ASRI BIN ARIFIN bertemu dengan saksi Muhammad Gurham Bin Muhammad Arsyad di pasar malam lalu mengajaknya ke Makassar menggunakan motor milik saksi. Sehingga terdakwa pun berangkat ke Makassar bersama saksi Muhammad Gurham bin Muhammad Arsyad dan tiba di rumah saksi Muh.Ilham Bin Ramli di kompleks Pam Taman Tirta Pelita Asri di kab.gowa sekitar pukul.23.00 wita
- Bahwa setibanya di rumah saksi MUH.ILHAM BIN RAMLI. Di kompleks BTN PAM Taman Tirta Pelita Asri di Kabupaten Gowa, terdakwa lalu mengambil sepeda motor Jupiter MX milik saksi Risal Bin Sahir lalu terdakwa menyuruh saksi Muhammad Guhram mengikutinya dari belakang, lalu terdakwa mengendarai motor Jupiter MX tersebut ke samping menara jembatan kembar lalu menyimpannya/memarkirnya ditempat tersebut kemudian terdakwa dengan dibonceng oleh saksi Muhammad Guhram kembali lagi kerumah saksi MUH. ILHAM BIN RAMLI mengambil dengan sepeda motor smash milik Basri Bin Ledeng lalu kembali membawanya ke samping jembatan kembar dengan diikuti oleh saksi Muhammad Guhram, lalu terdakwa ASRIANTO ALIAS ARI BIN ARIFIN menyuruh saksi Muhammad Guhram menunggu sedangkan terdakwa masuk kedalam jalan/lorong disamping jembatan kembar menuju dekat sampah dekat sampah lalu menyimpan motor tersebut dan selanjutnya terdakwa ASRIANTO ALIAS ARI BIN ARIFIN dan saksi Muhammad Guhram pulang ke Jeneponto pada saat itu juga.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Risal Bin Sahrir, saksi Basri Bin ledeng, dan saksi Agus Alias Boko Bin Baga mengalami kerugian secara keseluruhan kurang lebih sebesar Rp. 19.000.000,- ( Sembilan belas juta rupiah ).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.....**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses pengadilan anak dari keterangan saksi-saksi maupun dari Terdakwa sendiri dan beberapa bukti maka sampailah kepada pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yaitu: Pasal 363 ayat (2) KUHP.

Adapun unsur-unsur Pasal 363 ayat (2) adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu seluruh atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki barang itu secara melawan hukum;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Dengan cara “merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci palsu”

#### **Ad.1. Barang Siapa;**

Yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah menunjuk manusia sebagai subjek hukum natural yang mampu bertanggungjawab dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan. Adapun identitas yang tercantum dalam surat dakwaan bernama ASRIANTO ALIAS ASRI BIN ARIFIN

#### **Ad.2. Mengambil barang sesuatu seluruh atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki barang itu secara melawan hukum;**

Bahwa Terdakwa ASRIANTO ALIAS ASRI BIN ARIFIN melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor Jupiter MX, sepeda motor Suzuki Smash dan sepeda motor Jupiter Z di kolong rumah saksi Basri yang dilakukan dengan cara-cara sebagaimana yang terungkap dalam peridangan di Kp.Beru Desa Balangloe Kec.Tarawang Kab.Jeneponto tanpa seijin atau sepengetahuan saksi korban.

#### **Ad.3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari sabtu tanggal 12 April 2014, sekitar Pukul 02.00 wita Terdakwa ASRIANTO ALIAS ASRI BIN ARIFIN bersama-sama Lei.Iwan Bin Baso Tompo (DPO) melakukan tindak pidana pencurian tiga sepeda motor yang berada dalam kolong rumah saksi Basri Bin Ledeng di Kp.Beru Desa Balangloe Kec.Tarawang Kab.Jeneponto.

**Ad.4. Dengan cara “merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci palsu”**

Terdakwa ASRIANTO ALIAS ASRI BIN ARIFIN bersama-sama Lei.Iwan Bin Baso Tompo (DPO) melakukan tindak pidana pencurian berdasarkan fakta persidangan mencungkil papan/dinding bagian depan dari kandang di kolong rumah Basri, setelah terbuka, Terdakwa kemudian membuka salah satu sadel motor untuk mengambil obeng yang kemudian digunakan untuk merusak tempat kunci kontak dari sepeda motor Yamaha Jupiter MX lalu Terdakwa bawa keluar meninggalkan rumah saksi Basri Bin ledeng.

**3. Tuntutan Penuntut Umum**

1. Menyatakan Terdakwa ASRIANTO Alias ASRI Bin ARIFIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian Dengan Pemberatan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASRIANTO Alias ASRI Bin ARIFIN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna merah hitam No. Pol DD 3308 XZ Dikembalikan kepada Saksi Basri Bin Ledeng;
  - 1 (satu) karung berisikan mesin-mesin yang sudah dibongkar dan dipisahkan rangkanya; Dikembalikan kepada Alias Boko;



4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- { dua ribu rupiah };

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa ASRIANTO ALIAS ASRI BIN ARIFIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 15 (lima belas) hari;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
  - i. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna merah hitam No.Pol DD 3308 XZ, dikembalikan kepada saksi Basri Bin Ledeng;
  - ii. 1 (satu) karung berisikan mesin-mesin yang sudah dibongkar dan dipisahkan rangkanya, dikembalikan kepada saksi Agus alias Boko
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

#### **4. Analisis Penulis**

Berdasarkan Putusan Nomor: 09/PID.SUS/2014/PN.Jnp menyatakan bahwa Terdakwa ASRIANTO ALIAS ASRI BIN ARIFIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian yang diatur dan diancam di dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

Hal tersebut di atas sesuai dengan pasal yang tertuang dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam hal ini, surat dakwaan telah memenuhi rumusan delik dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa ASRIANTO ALIAS ASRI BIN ARIFIN.

#### **B. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian Sepeda Motor yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Jeneponto Nomor:09/PID.SUS/2014/PN.Jnp**

##### **1. Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS)**

Laporan hasil penelitian kemasyarakatan dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Laporan tersebut bertujuan agar Hakim dapat memperoleh data pribadi maupun keluarga dari Anak yang bersangkutan sehingga diharapkan hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Adapun isi laporan Pembimbing Kemasyarakatan dalam kasus ini, penulis menuangkan beberapa point antara lain:

1. Identitas Terdakwa;
2. Identitas Orang tua/ wali;
3. Riwayat Hidup Klien;
4. Keadaan Orang tua Klien;
5. Keadaan Lingkungan Masyarakat;
6. Masalah Klien;
7. Tanggapan berbagai pihak terhadap klien dan masalahnya; dan
8. Sumber daya yang dapat digunakan untuk reintegrasi sosial klien;

Dari keterangan diatas, Pembimbing kemasyarakatan kemudian menyimpulkan bahwa:

1. Klien diduga melakukan tindak pidana pencurian secara bersama-sama diancam Pasal 363 KUHP.
2. Usia Klien pada saat kejadian baru berusia 17 Tahun berdasarkan Kartu Keluarga terlampir dan diajukan dalam sidang pengadilan anak.
3. Faktor dominan penyebab klien melakukan tindak pidana pencurian karena:
  - a. Karena Klien merasa sakit hati akibat tindak lanjut omongan/bicara oleh korban

- b. Karena Klien habis minum ballo (miras)
4. Keluarga korban ingin agar Klien diproses dengan hukum yang berlaku
  5. Klien sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum
  6. Orang tua Klien sanggup mendidik dan mengawasi anaknya agar tidak berurusan dengan hukum lagi
  7. Masyarakat dan pemerintah setempat bersedia untuk membina Klien bilamana telah menjalani proses hukum
  8. Berdasarkan poin 1 s/d 7 memungkinkan Klien bisa dibina dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

Laporan hasil penelitian mengenai anak yang bersangkutan sebagaimana di atas disampaikan oleh pembimbing kemasyarakatan atas perintah hakim sebelum sidang dibuka. Hal tersebut diatur dalam Pasal 56 ayat (1) UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. kemudian dilanjutkan pada Pasal 59 ayat (2) UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dijelaskan bahwa hakim wajib mempertimbangkan laporan kemasyarakatan dalam putusannya. Wajib dalam hal ini jika laporan kemasyarakatan tidak dipertimbangkan oleh hakim maka putusan dinyatakan batal demi hukum. Demikian tercantum dalam penjelasan Pasal.59 ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

## **2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana**

Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terlebih dahulu dituntut untuk menelaah tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan melihat bukti-bukti dan keyakinan hakim itu sendiri. Setelah itu mempertimbangkan dan menilai peristiwa yang terjadi serta menghubungkan dengan aturan hukum yang berlaku yang selanjutnya memberikan suatu kesimpulan dengan menetapkan sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilakukan. Putusan apapun yang menjadi pertimbangan dijatuhkannya suatu putusan mengingat bahwa Terdakwa adalah seorang yang dikategorikan sebagai Anak.

Berbicara mengenai sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap anak selalu dikaitkan dengan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, di mana dalam uu tersebut dalam pertimbangannya menjelaskan bahwa:

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjalin pertumbuhan dan perkembangan fisik mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Dalam pertimbangan selanjutnya

menjelaskan bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan memberi perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan yang baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang mantap dan memadai. Oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan peradilan anak akan perlu dilakukan secara khusus.

Ketika seorang anak dihadapkan pada suatu persoalan menyangkut hukum dimana anak ini menempatkan diri sebagai pelaku. Pada umumnya perbuatan tersebut mereka lakukan dalam kondisi kejiwaan yang tidak stabil. Oleh karena itu, hakim haruslah memiliki pemahaman tentang Anak. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 Undang-undang No.3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak yang isinya sebagai berikut:

Syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai hakim anak antara lain:

- a. Telah berpengalaman sebagai hakim di pengadilan dalam lingkungan peradilan umum;
- b. Mempunyai minat perhatian dedikasi dan memahami masalah Anak

Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Nomor: 09/PID.SUS/2014/PN.Jnp adalah hakim Anak. Hakim Anak yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto yang telah mempunyai pengalaman

sebagai Hakim Anak pada Peradilan Umum dan Hakim yang mempunyai perhatian, dedikasi dan memahami masalah tentang Anak.

Ada beberapa hal yang menjadi dasar-dasar pertimbangan yang dipergunakan oleh hakim dalam memutus perkara dalam Putusan Nomor: 09/PID.SUS/ 2014/PN.Jnp yang pelakunya adalah Anak yang didasarkan pada fakta-fakta yang ada dalam persidangan dan juga berdasarkan rasa keadilan hakim dan mengacu pada pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan. Adapun yang menjadi pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa antara lain:

Menimbang, bahwa terhadap hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat jika hukuman tersebut sudah patut dan adil bagi diri Terdakwa dengan memperhatikan perbuatan yang dilakukan dan akibat yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung ternyata Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah atau penetapan penangkapan dan penahanan yang sah, sehingga oleh karenanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut Majelis Hakim berdasarkan Pasal 193 ayat 1 KUHP maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini:

**Hal-hal yang Memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

**Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa masih Anak-anak sehingga masih memerlukan bimbingan orang tua;
- Terdakwa dan Korban telah berdamai;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui secara terus terang atas perbuatannya.



### **3. Amar Putusan**

Memperhatikan Pasal 363 ayat (2) KUHP, Undang-undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berkenan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa ASRIANTO ALIAS ASRI BIN ARIFIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna merah hitam No.Pol DD 3308 XZ, dikembalikan kepada saksi Basri Bin Ledeng;
  - b. 1 (satu) karung berisi mesin-mesin yang sudah dibongkar dan dipisahkan rangkanya, dikembalikan kepada saksi Agus alias Boko

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin, 7 Juli 2014, oleh HASANUDDIN,SH.MH., Sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Jeneponto dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Gunawan,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jeneponto, serta dihadiri oleh BUDI UTAMA,SH. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Terdakwa.

#### **4. Analisis Penulis**

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka dapat dipahami bahwa dakwaan Penuntut Umum, Tuntutan Penuntut Umum dan pertimbangan Hakim dalam putusannya telah memenuhi semua unsur delik dan syarat dijatuhkannya pidana terhadap Terdakwa. Hal tersebut didasarkan dalam pemeriksaan di persidangan dimana alat bukti yang diajukan penuntut umum termasuk di dalamnya keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkaitan. Keterangan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya. Oleh karena itu Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto menyatakan dalam amar putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan

pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP serta menjatuhkan sanksi pidana kepada Terdakwa selama 6 (enam) bulan 15 (lima belas) hari.

Penulis dalam melakukan penelitian menggunakan metode wawancara, dalam hal ini Bapak Hasanuddin, S.H., M.H., Hakim yang memeriksa dan mengadili kasus tersebut. Beberapa hal yang beliau sampaikan adalah:

Bahwa hakim itu haruslah mencari dan membuktikan kebenaran materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta berpegang pada rumusan surat dakwaan Penuntut Umum. Jadi surat dakwaan jaksa punya pengaruh yang signifikan dalam menentukan apakah Terdakwa benar melakukan tindak pidana atau tidak.

Beliau juga mengemukakan bahwa Hakim harus memahami betul kondisi mental Anak dan berhati-hati dalam menjatuhkan sanksi pidana mengingat kondisi Anak yang masih terbilang labil. Kemudian di Jeneponto belum mempunyai Lapas Khusus Anak sehingga Anak yang ditahan berbaur dengan orang dewasa.

Menurut Penulis, hal tersebut di atas juga mempunyai pengaruh kondisi tekanan psikologi yang hebat bagi Anak dan dapat membentuk karakter yang tidak baik selama berada dalam tahanan.

Pak Hasanuddin menambahkan bahwa dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap Anak, maka yang juga dipertimbangkan adalah berat ringannya tindak pidana yang dilakukan, jika tindak pidana yang dilakukan tidak berat maka hakim seharusnya mengembalikan Terdakwa kepada orangtuanya tetapi jika berat maka sanksi pidana harus dijatuhkan yang tentu memperhatikan kondisi psikologi anak serta faktor-faktor yang melatarbelakangi Anak dalam melakukan tindakan kriminal. Faktor-faktor ini bisa dilihat dari sisi emosi psikologinya maupun karena lingkungan pergaulan Anak itu sendiri.

Berdasarkan uraian panjang di atas, penulis berpendapat hakim dalam proses beracara pada sidang pemeriksaan di Pengadilan maupun dalam menentukan hal-hal yang menjadi pertimbangannya telah tepat dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hanya saja menurut penulis hukuman yang dijatuhkan masih terbilang berat mengingat Terdakwa merupakan seorang Anak dan telah berdamai dengan korban. Kemudian korban juga merupakan Anak yang tidak mengenyam pendidikan ditambah hasil curian Terdakwa juga dikembalikan kepada pemilik masing-masing. Oleh karena itu ketelitian Hakim dalam menjatuhkan pidana Terhadap Anak sangat mempengaruhi kondisi psikologi dari Anak itu sendiri.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan hukum terhadap tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Anak di Kabupaten Jeneponto Nomor: 09/PID.SUS/2014/PN.Jnp

Berdasarkan pemeriksaan di persidangan, Hakim menerapkan Pasal 363 ayat (2) KUHPidana terhadap Terdakwa. Dalam pemeriksaan yang berlangsung, kondisi Anak dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani. Dengan demikian Terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya.

2. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Jeneponto Nomor:09/PID.SUS/2014/PN.Jnp

Adapun pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap Terdakwa yakni dengan memperhatikan unsur-unsur pasal yang terpenuhi sebagaimana tertuang dalam dakwaan Tunggal yakni Pasal 363 ayat (2) KUHPidana berdasarkan 2 (dua) alat bukti ditambah keyakinan hakim. Selain itu Hakim juga memperhatikan hal-hal yang meringankan maupun yang

memberatkan bagi Terdakwa. Untuk kasus ini, penulis menilai hakim masih kurang memperhatikan faktor-faktor yang meringankan dalam hal ini dengan berdamainya Terdakwa dengan korban sehingga seharusnya sanksi yang dijatuhkan lebih ringan. Jika dilihat dengan tujuan pemidanaan hanya untuk memberikan efek jera terdakwa dan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya maka sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim menurut penulis adalah masih tergolong berat.

## **B. Saran**

Adapun saran penulis terkait penelitian kasus ini, adalah:

1. Agar aparat penegak hukum jeli dalam merumuskan peraturan perundang-undangan dihubungkan dengan kasus yang terjadi terutama jika tindak pidana dilakukan oleh orang yang dalam Undang-undang dikategorikan sebagai Anak, sehingga ancaman pidana penjara menjadi alternatif terakhir bagi Anak.
2. Sebaiknya aparat penegak hukum dan masyarakat memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum secara aktif dan menyeluruh khususnya kepada anak di bawah umur mengenai dampak dari pencurian yang merugikan masyarakat itu sendiri.

## DAFTAR PUSAKA

- Andi Hamzah, 1993. *Peranan Hukum dan Peradilan*. Bina Aksara. Jakarta
- Bambang Poernomo, 1989. *Prinsip Penerapan Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta
- Darwan Prints, 2003. *Hukum Anak Indonesia*. PT.Citra Aditya. Bandung.
- Datuk Usman, 1984. *Diktat Hukum Adat*. Bina Sarana Balai Pemnas SU, Medan
- Gatot Supramono, 2007. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Djambatan. Jakarta
- Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana, Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Sinar Grafika. Jakarta
- Kansil, 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta
- Leden Marpaung, 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta
- M.Sudradjat Bassar, 1986. *Tindak-tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Remadja Karya. Bandung
- Moeljatno, 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta
- Moeljatno R, 2008. *Asas-Asas Hukum pidana*. Rineka Cipta, Jakarta
- P.A.F. Lamintang dan C.Djasman Samosir, 1981. *Delik-delik Khusus*. Tarsito. Bandung
- \_\_\_\_\_, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT.Citra Aditya Bakti. Bandung
- \_\_\_\_\_, dan theo lamintang, 2009, *Delik-Delik Khusus, Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Sinar Grafika, Jakarta
- R.Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar*. Politea. Bogor
- Sudarto, 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung

- \_\_\_\_\_, 1990. *Hukum Pidana I*. Yayasan Sudarto. Semarang
- Van Apeldoorn, 1976. *Pengantar Ilmu Hukum*. Pradnya Paramita. Jakarta
- Wagiati Soetodjo, 2006. *Hukum Pidana Anak*. Refika Adiatama. Bandung
- Wirjono Prodjodikoro, 2002. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*. PT. Eresco. Bandung
- \_\_\_\_\_, 1986. *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. PT.Eresco. Bandung

#### **Peraturan Perundang-undangan:**

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Konvensi tentang Hak-hak Anak
- Undang-undang No.12 tahun 1995 tentang Permayarakatan
- Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak